

**ANALISIS PENGARUH DANA DESA, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN  
BELANJA MODAL TERHADAP KETIMPANGAN WILAYAH DI PULAU  
SUMATERA**



**DISUSUN OLEH :**

**GAMALERI**

**(01021281823171)**

**EKONOMI PEMBANGUNAN**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**2023**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF**  
**ANALISIS PENGARUH DANA DESA, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN**  
**BELANJA MODAL TERHADAP KETIMPANGAN WILAYAH DI PULAU**  
**SUMATERA**

Disusun Oleh :

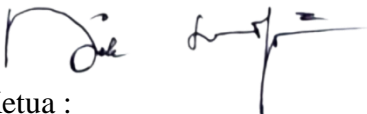
Nama : Gamaleri  
NIM : 01021281823171  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Ekonomi Pembangunan  
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.


Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal : 11 November 2022

  
Ketua :  
Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M. Si.  
NIP.196007101987031003

Tanggal : 18 Desember 2022

  
Anggota  
Dr. Siti Rohima, S.E., M. Si.  
NIP.196903142014092001

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

### ANALISIS PENGARUH DANA DESA, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN BELANJA MODAL TERHADAP KETIMPANGAN WILAYAH DI PULAU SUMATERA

Disusun oleh :

Nama : Gamaleri  
NIM : 01021281823171  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Ekonomi Pembangunan  
Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah


Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 02 Januari 2023 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.


Panitia Ujian Komprehensif  
Indralaya, 02 Januari 2023


Ketua

Anggota

Anggota

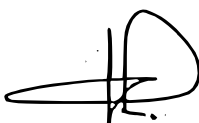
  
Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si  
NIP.196007101987031003

  
Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si  
NIP.196903142014092001

  
Feny Marissa, S.E., M.Si  
NIP.199004072018032001

Mengetahui  
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

**ASLI**  
17-1-2023  
JUR. EK. PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

  
Dr. Mukhlis, S.E., M.Si  
NIP.197304062010121001

## SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gamaleri  
NIM : 01021281823171  
Jurusan : Ekonomi Pembangunan  
Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah  
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : Analisis Pengaruh Dana Desa, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Wilayah di Pulau Sumatera.

Pembimbing : Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si  
Anggota : Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si  
Tanggal Ujian : 02 Januari 2023

Adalah benar hasil karya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Inderalaya, 16 Januari 2023

Pembuat Pernyataan



Gamaleri

NIM. 01021281823171

**ASLI**  
JUR. EK. PEMBANGUNAN 17-1-2023  
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

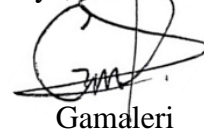
## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini sebagaimana mestinya. Skripsi ini berjudul **Analisis Pengaruh Dana Desa, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Wilayah di Pulau Sumatera**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Ekonomi program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai pengaruh Dana Desa, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Ketimpangan Wilayah di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera memiliki sepuluh provinsi dengan karakteristik dan sumberdaya yang berbeda-beda pada masing-masing provinsi, akibatnya menyebabkan ketimpangan pendapatan dan kesenjangan ekonomi antar wilayah, sehingga intervensi pemerintah dalam mengurangi ketimpangan tentu sangat diharapkan melalui berbagai kebijakan yang fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat yang diantaranya melalui kebijakan dana desa, dana alokasi khusus, dan belanja modal.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi dalam mengatasi masalah ketimpangan pembangunan di Pulau Sumatera dan sebagai bahan masukan bagi penelitian selanjutnya.

Indralaya, 16 Januari 2023



---

Gamaleri  
NIM. 01021281823171

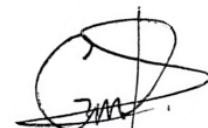
## UCAPAN TERIMA KASIH

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tersayang yang tak henti-hentinya memberikan kasih dan sayangnya kepada penulis. Terima kasih atas do'a dan dukungan ibu dan bapak dan semua yang telah kalian berikan kepada penulis hingga saat ini.
3. Bapak Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, bapak Dr. Mukhlis, S.E, M.Si selaku ketua jurusan Ekonomi Pembangunan dan bapak Dr. Sukanto, S.E, M.Si selaku sekretaris jurusan Ekonomi Pembangunan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Didik Susetyo, S.E, M.Si dan Ibu Dr. Siti Rohima, S.E, M.Si, selaku dosen pembimbing penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak atas waktu, tenaga, wawasan, dan segala bentuk arahan yang telah diberikan kepada penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Ibu Feny Marissa, S.E., M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran-saran terbaik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Dr. Suhel, S.E., M.Si selaku pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu dan saran-saran kepada penulis.

7. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya beserta staf pegawai dan karyawan/ti di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis selama ini.
8. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Indralaya, 16 Januari 2023



Gamaleri

---

NIM. 01021281823171

## ABSTRAK

### ANALISIS PENGARUH DANA DESA, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN BELANJA MODAL TERHADAP KETIMPANGAN WILAYAH DI PULAU SUMATERA

Oleh:

**Gamaleri; Didik Susetyo; Siti Rohima**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana desa, dana alokasi khusus, dan belanja modal terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Sumatera. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dari 10 provinsi di Pulau Sumatera dalam rentang waktu 2015-2021. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda data panel dengan metode pendekatan *Random Effect Model* (REM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel dana desa, dana alokasi khusus, dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Sumatera. Adapun secara parsial terdapat dua variabel yang berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah yaitu variabel dana alokasi khusus dan variabel belanja modal, sedangkan variabel dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Sumatera.

**Kata Kunci:** Dana Desa, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, Ketimpangan Wilayah.

Ketua,



Prof. Dr. H. Didik Susejyo, S.E., M.Si

NIP. 196007101987031003

Anggota,



Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si

NIP. 196903142014092001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si

NIP. 197304062010121001



## ABSTRACT

### ANALYSIS OF THE EFFECT OF VILLAGE FUNDS, SPECIAL ALLOCATION FUNDS, AND CAPITAL EXPENDITURES ON REGIONAL INEQUALITY ON THE ISLAND OF SUMATRA

By:

**Gamaleri; Didik Susetyo; Siti Rohima**

This study aims to analyze the effect of village funds, special allocation funds, and capital expenditures on regional inequality on the island of Sumatra. The data used in this study is panel data from 10 provinces on the island of Sumatra in the 2015-2021 time frame. The analysis technique used is a linear regression analysis technique with multiple panel data with the Random Effect Model (REM) approach method. The results of this study show that simultaneously the variables of village funds, special allocation funds, and capital expenditures together affect regional inequality on the island of Sumatra. Partially there are two variables that affect regional inequality, namely the special allocation fund variable and the capital expenditure variable, while the village fund variable does not have a significant effect on regional inequality on the island of Sumatra.

**Keywords:** Village Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure, Regional Inequality.

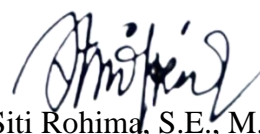
Head,



Prof. Dr. H. Didik Susetyo, S.E., M.Si

NIP. 196007101987031003

Member,



Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si

NIP. 196903142014092001

Acknowledge,

Head of the Development Economics Department



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si

NIP. 197304062010121001

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Gamaleri
	Jenis Kelamin	Laki-Laki
	Tempat/Tanggal Lahir	Segayam, 27 Agustus 2000
	Alamat	RT 003/RW 001, Dusun 1 Desa Sukamenang, Kec. Gelumbang, Kab. Muara Enim.
Email	<a href="mailto:gamaleri00@gmail.com">gamaleri00@gmail.com</a>	
Nomor HP	082372316290	
Kewarganegaraan	Indonesia	
Hobi	Olahraga Bola Voli	
Tinggi Badan	173 cm	
Berat Badan	70 kg	
<b>PENDIDIKAN FORMAL</b>		
2005-2011	SD Negeri 19 Gelumbang	
2011-2014	SMP Negeri 1 Gelumbang	
2014-2017	SMA Negeri 1 Indralaya Utara	
2017-2021	S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya	
<b>PENGALAMAN ORGANISASI</b>		
2019-2020	Anggota Dept. Syiar BO Ukhwah FE Unsri	
2020-2021	Anggota Dept. HRD KEIMI FE Unsri	
2021-2022	Sekretaris Divisi Humas IMEPA FE Unsri	

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	12
1.3    Tujuan Penelitian .....	12
1.4    Manfaat Penelitian .....	13
1.4.1    Manfaat Akademis .....	13
1.4.2    Manfaat Praktis .....	13
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>14</b>
2.1    Landasan Teori .....	14
2.1.1    Teori Pengeluaran Pemerintah Adolf Wagner .....	14
2.1.2    Teori Transfer Fiskal Menurut Rosen & Gayer (2007) .....	16
2.1.3    Teori Transfer Fiskal Menurut Shah (2006) .....	16
2.1.4    Hipotesis Neo-Klasik .....	17
2.2    Definisi dan Konsep.....	19
2.2.1    Ketimpangan Wilayah .....	19
2.2.2    Dana Desa .....	21
2.2.3    Dana Alokasi Khusus.....	22
2.2.4    Belanja Modal.....	23

2.2.5	Metode Perhitungan Indeks Williamson.....	25
2.3	Penelitian Terdahulu .....	26
2.4	Kerangka Pikir .....	30
2.5	Hipotesis Penelitian .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>33</b>
3.1	Ruang Lingkup Penelitian .....	33
3.2	Jenis dan Sumber Data.....	33
3.3	Teknik Analisis Data .....	34
3.3.1	Regresi Data Panel.....	36
3.3.2	Pemilihan Model Terbaik .....	37
3.3.3	Uji Asumsi Klasik.....	39
3.3.4	Uji Hipotesis .....	40
3.4	Definisi Operasional Variabel .....	42
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>45</b>
4.1	Gambaran umum.....	45
4.1.1	Kondisi Geografis Pulau Sumatera.....	45
4.1.2	Perkembangan Tingkat Indeks Williamson di Pulau Sumatera.....	47
4.1.3	Perkembangan Dana Alokasi Khusus di Pulau Sumatera .....	49
4.1.4	Perkembangan Dana Desa di Pulau Sumatera .....	51
4.1.5	Perkembangan Belanja Modal di Pulau Sumatera.....	53
4.2	Hasil Penelitian .....	55
4.2.1	Model Regresi Data Panel .....	55
4.2.2	Pemilihan Model Akhir .....	57
4.2.3	Pengujian Asumsi Klasik.....	59
4.2.4	Pengujian Koefisien Statistik.....	63
4.3	Pembahasan .....	65
4.3.1	Analisis Intersep Ketimpangan Wilayah dan Perbandingannya di Masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera.....	65
4.3.2	Pengaruh Dana Desa Terhadap Ketimpangan Wilayah di Pulau Sumatera .....	69
4.3.3	Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Ketimpangan Wilayah di Pulau Sumatera .....	71
4.3.4	Pengaruh Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Wilayah di Pulau Sumatera .....	73

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	75
5.1    Kesimpulan .....	75
5.2    Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	78
<b>LAMPIRAN</b> .....	84

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Wilayah menurut Provinsi di Pulau Sumatera .....	46
Tabel 4.2 Perkembangan Indeks Williamson di Pulau Sumatera .....	47
Tabel 4.3 Kategori Ketimpangan Wilayah antar Wilayah di Pulau Sumatera.....	49
Tabel 4.4 Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) Menurut Provinsi di Pulau Sumatera.....	50
Tabel 4.5 Rata-rata perkembangan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Pulau Sumatera.....	51
Tabel 4.6 Jumlah Dana Desa di Pulau Sumatera (milyar). .....	52
Tabel 4.7 Rata-rata perkembangan Dana Desa di Pulau Sumatera (milyar).....	53
Tabel 4.8 Jumlah Belanja Modal di Pulau Sumatera (milyar). .....	54
Tabel 4.9 Rata-rata perkembangan Belanja Modal di Pulau Sumatera (milyar). .	55
Tabel 4.10 Hasil Estimasi dengan metode CEM, FEM, dan REM.....	56
Tabel 4.11 Hasil Regresi Uji Pemilihan Model Terbaik.....	57
Tabel 4. 12 Hasil Regresi Metode Random Effect Model .....	58
Tabel 4.13 Hasil Regresi Menggunakan Uji Heteroskedastisitas .....	61
Tabel 4. 14 Hasil Regresi Uji Multikolinearitas .....	62
Tabel 4.15 Hasil Uji F.....	63
Tabel 4.16 Hasil Uji-t.....	64
Tabel 4.17 Nilai Intersep Individu Provinsi.....	66

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan Indeks Williamson 10 Provinsi di Pulau Sumatera ....	4
Gambar 1.2 Perkembangan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) 10 Provinsi di Pulau Sumatera. ....	6
Gambar 1.3 Perkembangan Jumlah Belanja Modal (BM) 10 Provinsi di Pulau Sumatera. ....	9
Gambar 1.4 Perkembangan Realisasi Dana Desa 10 Provinsi di Pulau Sumatera selama tahun 2019-2021. ....	11
Gambar 2. 1 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner .....	15
Gambar 2.2 Hipotesis Neo-Klasik .....	18
Gambar 2.3 Kerangka berpikir.....	30
Gambar 4.1 Hasil Regresi Menggunakan Uji Normalitas .....	60
Gambar 4. 2 Hasil Regresi Menggunakan Uji Autokorelasi .....	61

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Regresi Data Panel <i>Common Effect Model</i> .....	84
Lampiran 2 Hasil Regresi Data Panel <i>Fixed Effect Model</i> .....	85
Lampiran 3 Hasil Regresi Data Panel <i>Random Effect Model</i> .....	86
Lampiran 4 Hasil Uji Chow .....	87
Lampiran 5 Hasil Uji Hausman.....	88
Lampiran 6 Hasil Uji BP-LM .....	89
Lampiran 7 Hasil Uji Normalitas .....	89
Lampiran 8 Hasil Uji Multikolinearitas .....	90
Lampiran 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	90
Lampiran 10. Hasil Perhitungan Intersep.....	91
Lampiran 11 Penerimaan PDRB menurut Provinsi di Pulau Sumatera.....	91
Lampiran 12 Jumlah Penduduk menurut Provinsi di Pulau Sumatera.....	92
Lampiran 13 Penerimaan Dana Desa menurut Provinsi di Pulau Sumatera.....	92
Lampiran 14 Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Provinsi di Pulau Sumatera .....	93
Lampiran 15 Penerimaan Belanja Modal (BM) menurut Provinsi di Pulau Sumatera .....	93
Lampiran 16 Ketimpangan Wilayah/Indeks Williamson menurut Provinsi di Pulau Sumatera .....	94



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Permasalahan utama dalam mendorong pembangunan ekonomi di suatu negara, terutama negara yang memiliki banyak kepulauan adalah kesenjangan sumber daya dan perbedaan perekonomian antar daerah (Azizi, 2018). Pembangunan ekonomi yang dimaksud adalah proses pengelolaan sumber daya yang dilakukan secara berkesinambungan oleh unsur masyarakat dan pemerintah guna menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mendongkrak perekonomian. Pembangunan ekonomi juga merupakan suatu proses kompleks yang mampu meningkatkan pendapatan per kapita penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu (Nangarumba, 2015).

Pembangunan ekonomi di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera, makmur dan berkeadilan. Kurniasih (2013) menegaskan bahwa salah satu pencapaian pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan pendapatan antar penduduk, antar wilayah, dan antar sektor. Pada kenyataannya, perkembangan ekonomi tidak selalu diiringi oleh pemerataan ekonomi yang proporsional sehingga hal ini menjadi masalah yang harus dihadapi dengan serius. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan cepat, sedangkan daerah-daerah lain mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah ini belum banyak berkembang karena berbagai faktor, misalnya karena kurangnya sumber daya, investor sering memilih daerah

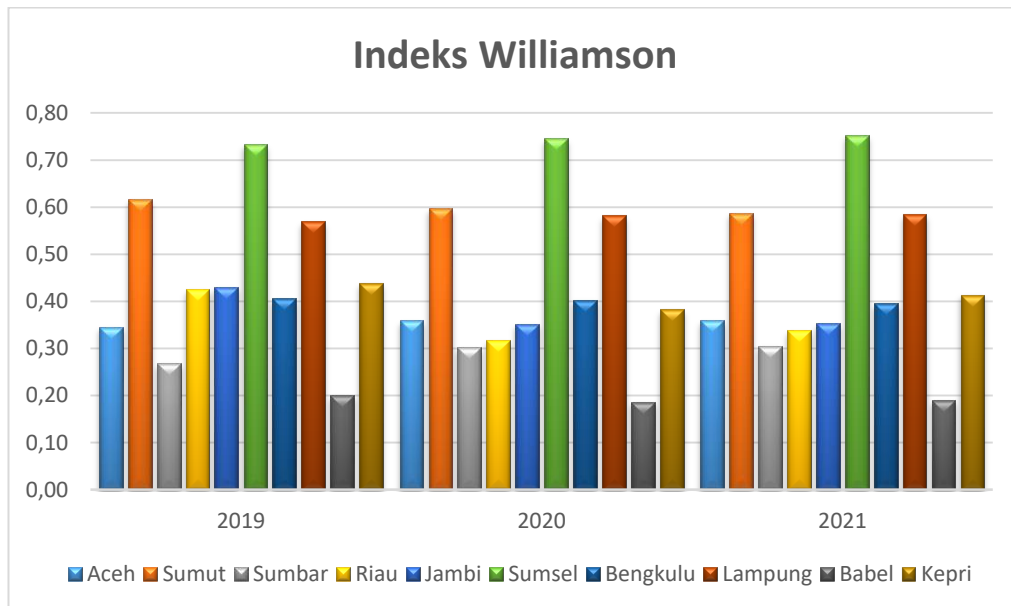
perkotaan atau daerah dengan infrastruktur yang mapan untuk tenaga kerja terampil, listrik, telekomunikasi, dan transportasi. Redistribusi pembagian pendapatan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah juga tidak seimbang, yang dapat mengakibatkan perbedaan kemajuan antar daerah (pertumbuhan ekonomi) (Kuncoro, 2004).

Suatu daerah dapat dikategorikan berhasil dalam mendorong pembangunan ekonomi apabila daerah tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan standar hidup masyarakatnya secara merata. Tanpa pemerataan ekonomi, pertumbuhan ekonomi hanya akan memperlebar kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin atau antar daerah yang maju dan daerah tertinggal. Ketimpangan yang tinggi dapat menyebabkan sejumlah masalah, seperti masalah kecemburuan sosial, rentan terjadi disintegrasi regional, dan ketidakseimbangan ekonomi yang lebih luas. Di Indonesia sendiri terlihat adanya wilayah yang maju dan yang kurang maju sebagai akibat dari perbedaan tersebut, maka disinilah peran pemerintah diperlukan dalam penyelesaian pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan wilayah sehingga ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka pemerataan wilayah juga akan meningkat (Andhiani *et al.*, 2018).

Indonesia merupakan negara yang tersusun dari banyak kepulauan dimana salah satu pulau terbesarnya adalah Pulau Sumatera. Pulau Sumatera menjadi pulau terbesar keenam di dunia dengan luas  $\pm 473.481 \text{ km}^2$  dan jumlah penduduk sebanyak 57.940.351 juta jiwa (sensus 2020) atau 21,68 persen dari persentase penduduk Indonesia (Teniwut, 2022). Pulau Sumatera tersusun dari sepuluh

provinsi, dimana setiap provinsi dikaruniai dengan potensi sumber daya dan karakteristik wilayah yang berbeda pada masing-masing daerah. Perbedaan inilah yang menyebabkan ketimpangan pendapatan dan perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi. Perbedaan ini berupa perbedaan karakteristik alam, teknologi, sosial, ekonomi, dan sumber daya alam yang penyebarannya berbeda pada setiap daerah.

Karakteristik fisik dan sosial wilayah di Pulau Sumatera yang beragam memberikan berbagai potensi wilayah berbeda. Perbedaan potensi daerah ini menimbulkan ketimpangan, baik yang bersifat antar wilayah, antar desa dan kota, maupun antar kategori sosial ekonomi. Dengan terkonsentrasinya kegiatan ekonomi di beberapa provinsi yang kaya akan sumber daya alam, perbedaan tersebut dapat menjadi penghambat pemerataan pembangunan. Kekayaan alam tersebut seharusnya menjadi nilai tambah bagi pembangunan ekonomi dan diharapkan dapat menyebar (*spread effect*). Namun pada kenyataannya kekayaan alam ini tidak dimiliki setiap provinsi secara merata. Hal inilah yang dapat menyebabkan kesenjangan pada masing-masing provinsi (Andhiani *et al.*, 2018). Kondisi ketimpangan wilayah di Pulau Sumatera dapat digambarkan melalui indikator Indeks Williamson yang bisa dilihat pada Gambar 1.1.



**Gambar 1.1 Perkembangan Indeks Williamson 10 Provinsi di Pulau Sumatera**

*Sumber : BPS (2022), data diolah.*

Indeks Williamson dipergunakan dalam pengukuran tingkat ketimpangan antar wilayah dengan metode pendekatan jumlah penduduk dan PDRB perkapita. Indeks Williamson diukur antara 0 sampai dengan 1, semakin mendekati 0 maka ketimpangan antar provinsi di Pulau Sumatera akan semakin rendah yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang merata. Sebaliknya, ketika Indeks Williamson mendekati 1 maka ketimpangan pembangunan antar provinsi di Pulau Sumatera akan semakin tinggi yang menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi regional yang tidak merata (Noviar, 2021).

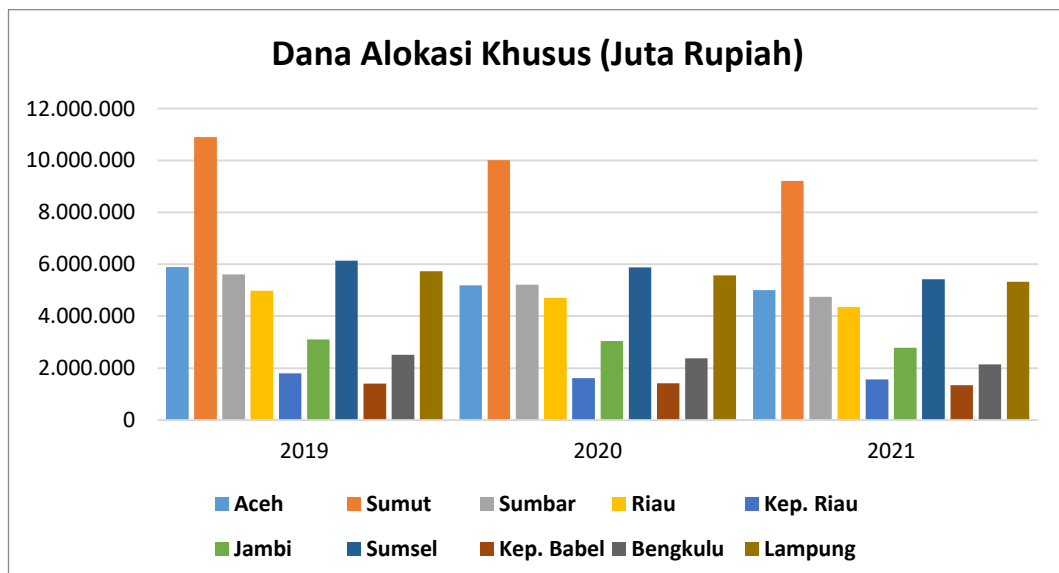
Gambar 1.1 menunjukkan kondisi Indeks Williamson dari sepuluh provinsi di Pulau Sumatera, secara garis besar dalam tiga tahun terakhir Provinsi Sumatera selatan cenderung berada dalam klasifikasi ketimpangan tinggi dengan rata-rata indeks Williamson sebesar 0,74. Sementara itu untuk provinsi dengan

klasifikasi ketimpangan rendah ditempati Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki rata-rata indeks Williamson sebesar 0,19. Di Pulau Sumatera, terdapat indikasi bahwa akan semakin membesarnya ketimpangan pembangunan antar provinsi. Pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Sumatera Utara akan meningkat dengan pesat, sementara provinsi lainnya seperti Provinsi Kep Bangka Belitung akan tertinggal. Adapun faktor penyebabnya diperkirakan akibat perbedaan dalam jumlah investasi dan tenaga kerja. Daerah yang kaya sumber daya alam akan tumbuh lebih cepat, sedangkan daerah miskin sumber daya akan tertinggal (Tan, 2013). Sementara itu, Andhiani *et al.*, (2018) berpendapat bahwa ketimpangan daerah yang mengalami naik turun merupakan isu penting yang harus disikapi oleh pemerintah atau pihak terkait lainnya karena mempengaruhi setiap provinsi di setiap tahun. Jika pemerintah tidak mengambil tindakan untuk mengurangi ketimpangan, baik dari sisi distribusi fisik maupun distribusi ekonomi, maka akan terus terjadi bahkan memburuk.

Di era otonomi daerah saat ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, dimana setiap daerah dituntut untuk mengelola potensi daerahnya sendiri secara tepat guna untuk mendorong proses pembangunan dengan tingkat pemerataan yang baik dan pertumbuhan ekonomi yang baik pula. Dengan demikian ketimpangan pembangunan antara wilayah yang maju dan wilayah yang tertinggal dapat menurun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004. Pemerintah daerah (Pemda)

bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya ekonomi sedemikian rupa sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut (Christia, 2019).

Setiap daerah pada dasarnya memiliki pagu anggaran yang berbeda untuk memenuhi semua kebutuhannya, hal ini menyebabkan timbulnya ketidaksetaraan keuangan antar daerah. Oleh karena itu, pemerintah mengalokasikan uang dari APBN, dimana salah satunya Dana Alokasi Khusus yang ditujukan untuk membantu pembiayaan kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi (Bado *et al.*, 2019). Kebijakan dana alokasi khusus merupakan salah satu solusi yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah, namun tidak atau belum tertampung dalam formulasi dana alokasi umum. Oleh sebab itu, kebijakan dana alokasi khusus ini menjadi prioritas utama dalam membantu daerah dengan kapasitas keuangan di bawah rata-rata nasional (Nuryadin & Suharsih, 2017).



**Gambar 1.2 Perkembangan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) 10 Provinsi di Pulau Sumatera.**

*Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2022), data diolah.*

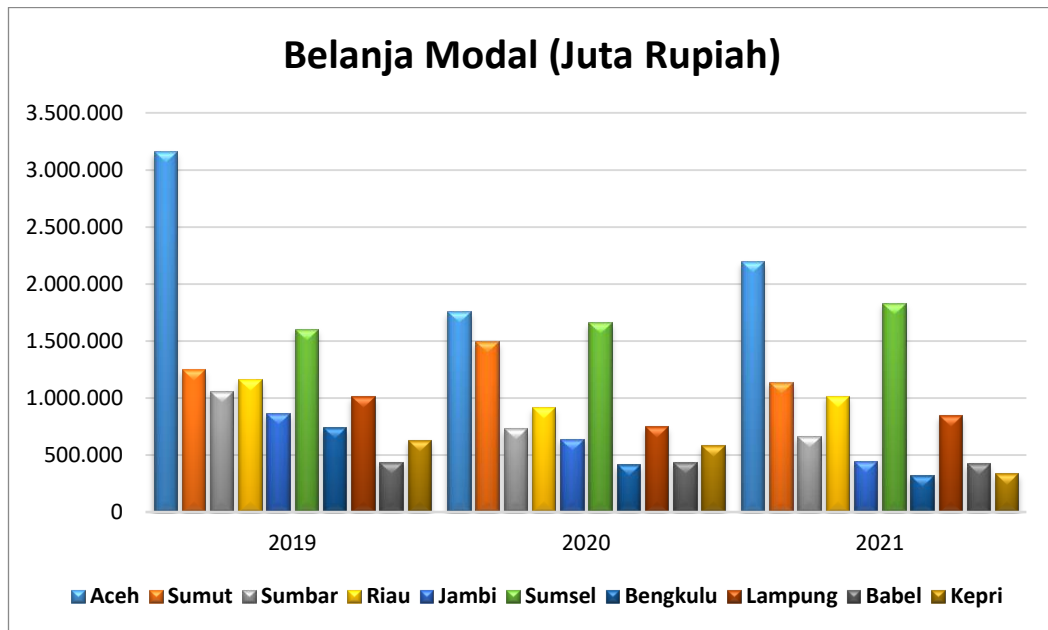
Berdasarkan Gambar 1.2, dapat diketahui bahwa realisasi DAK 10 provinsi selama rentang waktu tiga tahun terakhir cenderung mengalami sedikit penurunan serta terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antar provinsi, yaitu di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki tingkat DAK paling tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain. Provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk terbesar di Pulau Sumatera, selain itu Provinsi Sumatera Utara juga memiliki sumber daya alam yang melimpah serta tingkat investasi dan tenaga kerja yang tinggi. Hal tersebut menjadi tolak ukur pemerintah pusat dalam menyalurkan DAK sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan pemerintah pusat, baik kriteria umum, kriteria khusus, maupun kriteria teknis guna mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui 19 bidang yang didanai DAK diantaranya bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum, infrastruktur sanitasi, prasarana pemerintah, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, perdagangan, sarana dan prasarana daerah tertinggal, listrik pedesaan, perumahan dan permukiman, transportasi pedesaan, sarana dan prasarana kawasan perbatasan, keselamatan transportasi darat (Bappenas, 2011).

Infrastruktur merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang aktivitas dan mobilitas ekonomi suatu daerah, perkembangan kapasitas infrastruktur suatu daerah akan berjalan seiring dengan pertumbuhan output ekonomi daerah tersebut. Oleh sebab itu, setiap daerah akan berlomba-lomba untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur daerahnya. Di Indonesia sendiri,

pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur, terutama dalam melaksanakan percepatan penyediaan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang dimilikinya. Di dalam struktur APBD, alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur dianggarkan dalam bentuk belanja modal (Saraswati, 2018).

Handayani *et al.*, (2019) mengemukakan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang berasal dari APBD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Salah satu kegiatan dalam belanja modal yang mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan yaitu pembangunan infrastruktur berupa fasilitas umum. Selain itu, infrastruktur memiliki dampak yang nyata terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk dengan meningkatkan nilai konsumsi, produktivitas tenaga kerja, dan akses ke lapangan kerja, serta dengan meningkatkan kemakmuran nyata. Pesatnya pembangunan infrastruktur di suatu daerah dapat mendorong kegiatan investasi di daerah tersebut, yang akan mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah di masa depan.





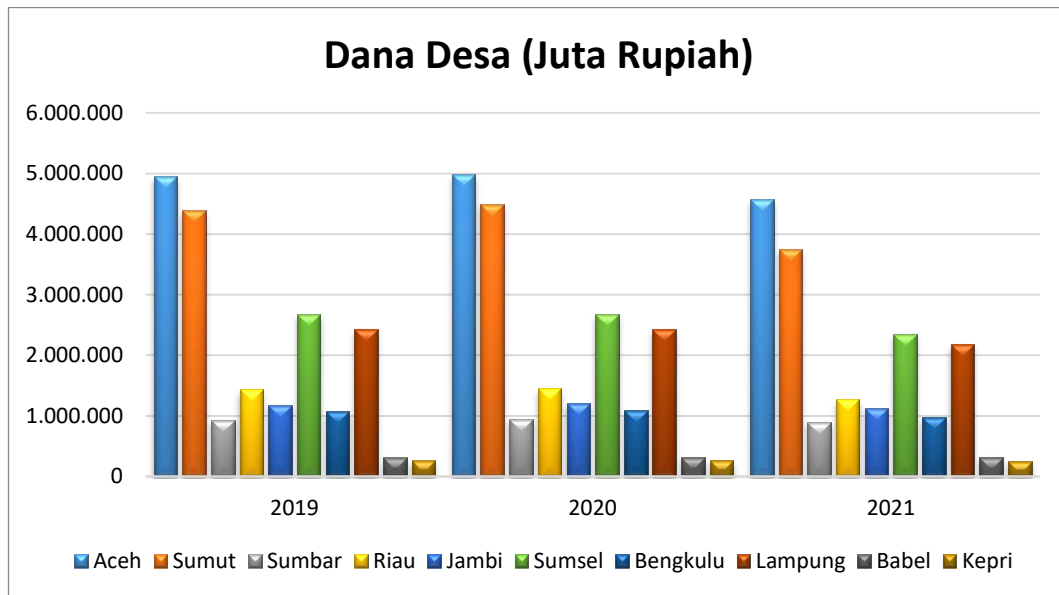
**Gambar 1.3 Perkembangan Jumlah Belanja Modal (BM) 10 Provinsi di Pulau Sumatera.**

*Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2022), data diolah.*

Berdasarkan Gambar 1.3 dapat diketahui sepanjang tahun 2019-2021 kondisi perkembangan belanja modal cenderung berfluktuatif, dimana provinsi dengan jumlah belanja modal terbesar adalah Provinsi Aceh. Pada tahun 2019 jumlah belanja modal di provinsi aceh sebesar Rp3.162.088 juta, hingga pada tahun 2020 dan 2021 Provinsi Aceh menjadi provinsi dengan jumlah belanja modal tertinggi meskipun terjadi penurunan yang cukup signifikan sebesar Rp1.755.472 juta di tahun 2020 dan di tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar Rp 2.199.333 juta. Pemerintah daerah setiap tahun menyalurkan belanja modal untuk setiap daerah dengan nominal yang cukup besar serta cenderung mengalami kenaikan dan penurunan sesuai dengan kondisi kebutuhan masing-masing daerah. Keadaan ini tentunya harus diimbangi dengan

pengelolaan dan perencanaan yang baik dari pemerintah daerah sehingga tercapai pembangunan ekonomi dan penurunan kesenjangan.

Dalam pelaksanaannya terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi ketimpangan wilayah ini, selain dana alokasi khusus dan belanja modal terdapat juga dana desa yang menjadi stimulus dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan daerah dan nasional, dimana dana desa sendiri merupakan bagian penting dalam kegiatan pembangunan desa. Menurut DJPB Kemenkeu, (2022) dana desa adalah sebuah program yang dirancang pemerintah dengan harapan dapat mendukung pembangunan desa, seperti dalam UU No. 6 tahun 2014 yang berbunyi dana desa adalah suatu komponen pendapatan desa yang berasal dari APBN. Dana desa mulai diberlakukan sejak tahun 2015 setelah disahkannya PP No. 60 tahun 2014 dan UU No. 6 tahun 2014 mengenai dana desa. Dana desa diberlakukan dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan desa guna mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Berikut gambaran jumlah realisasi dana desa di Pulau Sumatera.



**Gambar 1.4 Perkembangan Realisasi Dana Desa 10 Provinsi di Pulau Sumatera selama tahun 2019-2021.**

*Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2022), data diolah.*

Pada Gambar 1.4 mengilustrasikan bagaimana setiap desa menerima anggaran dana desa tahunan dari pemerintah pusat untuk setiap desa dengan angka yang cukup besar dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Di tahun 2019 jumlah dana desa tertinggi diterima oleh Provinsi Aceh sebesar Rp4.950.916 juta. Hingga tahun 2020 dan 2021 dana desa di Provinsi Aceh masih menjadi yang tertinggi dimana tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp4.977.709 juta dan sebaliknya di tahun 2021 mengalami penurunan Rp4.573.762 juta. Sedangkan jumlah dana desa terendah sepanjang tahun 2019 sampai 2021 diterima oleh Provinsi Kep. Riau. Di tahun 2019 jumlah dana desa Provinsi Kep. Riau sebesar Rp260.250 juta, hingga tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp269.976 juta dan di tahun 2021 justru mengalami penurunan sebesar Rp253.842 juta.

Jika dilihat secara keseluruhan dana desa yang dialokasikan pemerintah pusat untuk setiap desa di Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 hingga 2021 pemerintah setidaknya telah menambah dana desa sebesar Rp12 triliun sehingga pada tahun 2021 dana desa menjadi Rp72 triliun. Salah satu faktor dana desa akan terus meningkat setiap tahun adalah karena jumlah desa yang terus mengalami pemekaran, jumlah penduduk yang terus bertambah, dan tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Jumlah seluruh dana desa yang telah disalurkan selama tahun 2015-2021 sebesar Rp400,1 triliun dalam mendongkrak perekonomian desa (Indrawati, 2017).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa Dana Desa, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal memiliki potensi besar untuk mengurangi Ketimpangan Pembangunan antar Wilayah di Pulau Sumatera.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang , maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaruh Dana Desa, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Ketimpangan Wilayah di Pulau Sumatera?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Menganalisis adanya pengaruh Dana Desa, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Ketimpangan Wilayah di Pulau Sumatera.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau kontribusi, informasi serta dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya terutama mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan khususnya dan mahasiswa Fakultas Ekonomi pada umumnya tentang peran Dana Desa, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal dalam mengurangi tingkat Ketimpangan Wilayah antar Provinsi di Pulau Sumatera
- b. Penelitian ini juga diharapkan bisa melengkapi kajian-kajian mengenai Ketimpangan Pembangunan antar Wilayah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Bagi Peneliti, peneliti dapat menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh selama proses perkuliahan. Peneliti dapat lebih memahami tentang pengaruh Dana Desa, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Ketimpangan Wilayah antar Provinsi di Pulau Sumatera.
- b. Bagi Pemerintah daerah provinsi, penelitian ini dapat menjadi sumber masukan dan acuan yang berguna bagi pemerintah dalam upaya pengambilan kebijakan, terutama yang bersinggungan terhadap ketimpangan sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat daerah khususnya di Pulau Sumatera dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfiansyah, H., & Budyanra, B. (2020). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2017. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2019(1), 424–429. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2019i1.26>
- Ambya. (2020). Transformasi Alokasi Dana Desa terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Wilayah Perdesaan di Indonesia. *Pembangunan, Jurusan Ekonomi Lampung, Universitas*, 9(1), 15–23.
- Andhiani, K. D., Erfit, & Bhakti, A. (2018). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan di Wilayah Sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 26–34. <https://online-journal.unja.ac.id/pdpd/article/view/4602>
- Anshari, M., Azhar, Z., & Ariusni. (2018). Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Provinsi dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ecogen*, 1(September), 494–502.
- Azizi, M. (2018). Dampak Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2005 – 2014. *Universitas Muslim Indonesia Makassar*, II(April), 1–32.
- Bado, B., Alam, S., & Zain, W. M. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Ketimpangan Pembangunan di Sulawesi Selatan. *Jurnal E-Prints, Universitas Negeri Makassar*, 40(2), 164–168.
- Balseven, H., & Tugcu, C. T. (2017). Analyzing the Effects of Fiscal Policy on Income Distribution : A Comparison between Developed and Developing Countries. *IJEFI*, 7(2), 377–383.
- Bappenas. (2011). Analisis Perspektif, Permasalahan dan Dana Alokasi Khusus (DAK). *White Paper*. Jakarta: Bappenas.

- BPS. (2019). *Ekonomi Sumatera Masih Tergantung Alam*.  
<https://www.bps.go.id/news/2019/07/22/302/ekonomi-sumatra-masih-tergantung-alam.html>
- BPS. (2022). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi di Indonesia tahun 2010-2020*. Badan Pusat Statistik Nasional.  
<https://www.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto--lapangan-usaha-.html#subjekViewTab3>
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Law Reform, Universitas Diponegoro*, 15(1), 149–163.
- Damodar N., G. dan D. C. P. (2012). *Dasar - dasar Ekonometrika Buku 2* (5th ed.). Salemba 4.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2022). Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya. *DJPB Kemenkeu*.  
<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2022). *Postur APBD*. DJPK Kemenkeu. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2022). *Postur TKDD*.  
<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd>
- Fan, S., Zhang, L., & Zhang, X. (2002). Growth, Inequality, and Poverty in Rural China, the Role of Public Investments. *IFPRI, (Research report 125) Internasional Food Policy Research Institute Washington, D.C*, ISBN 0-89629-128-6.
- Gani, W., & Kristanto, S. B. (2013). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. *InFestasi*, 9(2), 115–122.

- Gujarati, D. (2003). *Ekonometrika Dasar* (T. S. Zain (ed.)). Salemba Empat.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2013). *Dasar - Dasar Ekonometrika* (S. Empat (ed.)). Salemba Empat.
- Halim, A. (2007). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Keempat (Revisi). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Handayani, T., Susetyo, D., & Saleh, M. S. (2019). Pengaruh Belanja Modal, Infrastruktur dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 92–100. <https://doi.org/10.29259/jep.v15i2.8837>
- Hutapia, W., & Almanuar, B. (2020). Pengaruh Dana Desa Terhadap Disparitas Pembangunan Antar Kabupaten Di Provinsi Bengkulu. *Jurnal AGRISEP: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 19(1), 43–52. <https://doi.org/10.31186/jagrisep.19.1.43-52>
- Indrawati, S. M. (2017). *Buku Pintar Dana desa*. Jakarta: DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Iqbal, M. (2015). *Regresi Data Panel (2) "Tahap Analisis."* Perbanas Institute. <https://dosen.perbanas.id/regresi-data-panel-2-tahap-analisis/2015>
- Islami, F. S., & Nugroho. (2018). Faktor-Faktor Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 33(1), 29–39. <https://doi.org/10.24856/mem.v33i1.564>
- Ismail, Y. R., Arham, M. A., & Dai, S. I. S. (2019). Analysis Of Village Dau , Dak , And Funds On Inequality Distribution Income And Growth In Indonesia. *Jambura Equilibrium Jurnal*, 2015-2018. 1(2).
- Jhingan, M. L. (2016). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. (17th ed.). Rajawali Pers.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi. Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Erlangga.



- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi Pembangunan*. In Yogyakarta. Erlangga.
- Kurniasih, E. P. (2013). Ketimpangan Wilayah di Provinsi Kalimantan Barat Suatu Kajian terhadap Hipotesis Kuznet. *Jurnal Eksos*, 9(2009), 36–48.
- Mangkoesoebroto, G. (2016). *Ekonomi Publik* (3rd ed.). FE UGM.
- Muhyiddin T. Nurlina, M. Irfan Tarmizi, A. Y. (2018). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial: Teori, Konsep, dan Rencana Proposal*. Salemba Empat.
- Mulyasari, A. (2018). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Angkatan Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto. *Economics Development Analysis Journal*, 5(4), 368–376. <https://doi.org/10.15294/edaj.v5i4.22174>
- Nangarumba, M. (2015). Analisis Pengaruh Struktur Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Belanja Modal, dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2014. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 7(2), 9–26.
- Noviar (2021). Inequality Analysis And Classification Of Economic Development Regencies/Cities In Banten Province 2016-2020. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 5(1), 24-33.
- Nuryadin, D., & Suharsih, S. (2017). Analisis Dan Evaluasi Dampak Dana Alokasi Khusus Terhadap Indikator Kinerja Pembangunan Di Daerah Studi Kasus Kabupaten-Kota 2003-2013. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 18(1). <https://doi.org/10.18196/jesp.18.1.3954>
- Putra, P. G. M., & Agung, U. I. G. K. (2017). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 11.3 (2015) : 863-877, ISSN : 2302 – 8556..
- Qibti, M. H. M., & Hendarto, M. (2020). Analisis Spillover Effect Pertumbuhan Ekonomi Antar Kabupaten / Kota di Kawasan Purwomanggung Jawa Tengah Tahun 1988-2018. *Diponegoro Journal of Economics*, 9.

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje>

- Rohima, S. (2020). Poverty Reduction in Regencies / Municipalities in South Sumatra Province. *Society*, 8(2), 581–595. <https://doi.org/10.33019/society.v8i2.215>
- Rosen, H. S., & Gayer, T. (2007). *Public Finance*. Eighth Edition. Singapore and New York: McGraw-Hill International Edition.
- Roy, J. (2015). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Kalimantan Timur. *Samarinda, Universitas Mulawarman*, 12(2), 300–319.
- Saraswati, D. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dana Perimbangan Sebagai Pemoderasi Di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, Vol.8 No.2 Januari 2018, 8(2), 54–68.
- Setiawan, A. (2019). Analysis of differences in poverty levels and rural inequality before and after the village funds are revolved. *JEBM*, 16(1), 31–35.
- Shah, A. (2006). A Practitioner's Guide to Intergovernmental Fiscal Transfers. *Revista de Economía y Estadística*, 44(2), 127–186. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-4039>
- Sirojuzilam. (2005). *Beberapa Aspek Pembangunan Regional*. Bandung: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.
- Sjafrizal. (2008). *Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sjafrizal. (2012). *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*. Jurnal Buletin Prisma.
- Syamsir, A., & Rahman, A. (2018). Menelusur Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten dan Kota. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 5(1), 22. <https://doi.org/10.24252/ecc.v5i1.5235>

- Tan, S. (2014). *Perencanaan Pembangunan: Teori dan Implementasi Pada Pembangunan Daerah*. FE-UNJA: Jambi.
- Teniwut, Meilani. (2022). *Urutan Lima Pulau Terbesar di Indonesia*. Media Indonesia, Jakarta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2013). *Pembangunan Ekonomi (edisi kesebelas, jilid I)* (Erlangga (ed.)).
- Wu, X., & Perloff, J. M. (2006). Effects of Government Policies on Urban and Rural Income Inequality. *The Review of income and wealth*, 52(2), 213-235.
- Yeniwati. (2013). Ketimpangan Ekonomi Antar Provinsi di Sumatera. *Jurnal Kajian Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, 2(03), 1–21.